



Relasi Perwakilan, Pemilihan dan Voting dalam Penyelenggaraan Demokrasi di Indonesia

Sumardi¹, Eko Prio Purnomo²

¹ Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

² Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia

E-mail : sumardi1610@gmail.com ¹, eko@umy.ac.id ²

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyelenggaraan politik di Indonesia dengan berbagai model dan sistem demokrasi yang diterapkan. Menggunakan deskriptif kualitatif dengan analisis literatur review. Melalui perbandingan Model Pemilihan, Perwakilan dan Voting. Demokrasi yang diselenggarakan melalui hajatan pemilihan umum secara periodik sejatinya menjadi landasan dan payung terciptanya pengembangan kultur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Namun prosesnya cenderung mengindikasikan hanyalah ajang mencari bentuk dan sangat sulit menyesuaikan diri. Antara Perwakilan, Pemilihan dan Voting wujud demokrasi ideal nampak menjadi anomali dalam perwujudan kualitas demokrasi. Implikasinya beragam, Partai Politik tumbuh subur tidak berbanding lurus dengan kualitas kebijakan negara, memperkuat eksistensi kuasa elit tanpa merawat akal sehat penyelenggara pemerintahan sebagai kendali negara. Akhirnya muncul distribusi kuasa yang tidak memiliki kepercayaan publik

Kata Kunci: Relasi; Demokrasi; Politik; Pemilu

Abstract

This paper aims to analyze the practice of political administration in Indonesia with various models and democratic systems that are applied. Using descriptive qualitative analysis with literature review. Through comparison of Model Selection, Representative and Voting. Democracy held through election celebrations general periodicity actually becomes the foundation and umbrella for its creation development of culture and improvement of community welfare and interests general. However, the process tends to indicate that it is just a place to find form and very difficult to adjust. Between Representatives, Elections and Voting exist ideal democracy seems to be an anomaly in the realization of the quality of democracy. The implications are diverse, political parties thrive not in direct proportion to the quality of state policies, strengthening the existence of elite power without caring for common sense government administrators as state control. Finally comes the distribution of power who have no public trust.

Keywords: Relation; Democracy; Politics; General Election

PENDAHULUAN

Wujud tranformasi politik dan pemerintahan yang terjadi setelah reformasi 1998 adalah reduksi birokrasi yang lebih baik. Tranformasi birokrasi yang dimaksud tidak hanya menitikberatkan pada persoalan kinerja dalam memberikan layanan kepada masyarakat akan tetapi munculnya berbagai kepentingan dar elit politik di tatanan birokrasi, (Supardal, 2016). Menariknya adalah tarik ulur kepentingan dikalangan para pejabat birokrat sebagai bagian dari elit politik membawa implikasi terhadap proses formulasi kebijakan yang irasional dengan mengorientasikan kebijakan parsial demi kepentingan elit mengabaikan

kepentingan umum. Asumsi itu muncul atas adanya kencerungan anomali politik walaupun pada umumnya memiliki misi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, alih-alih tersebut, nampaknya belum mampu mengabaikan bahwa ideologi dan gerakan yang dilakukan didominasi oleh kepentingan untuk berkuasa. (Shalihin, 2015).

Kultur politik semacam itu justru mengindikasikan kegaduhan dalam proses demokrasi yang berlangsung semenjak reformasi. Akibat rakusnya praktik politik yang dilakukan oleh para elit politik dalam mengendalikan khasanah berbangsa dan bernegara, maka kemudian timbul ketidakpercayaan (*distrust*) (Volodin, 2019), masyarakat terhadap partai politik dan parlemen. Padahal peran parlemen sebagai wadah penampung elit-elit perwakilan politik diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat. Namun kultur parlemen yang sebagian besar menghambahkan diri terhadap partai pengusungnya ketimbang melakukan kreatifitas demi pembangunan karakter bangsa menjadi bagian atas lemahnya mekanisme perekrutan partai terhadap elit dalam menyelenggarakan demokrasi kerakyatan. (Al-Hamdi, 2015).

Suhu politik dan pengaruhnya dalam demokrasi yang sekian lama terjadi, disisi lain juga membuka ruang tumbuh kembangnya tiga aktor dalam pemerintahan yakni organisasi non pemerintah, negara dan pemerintah lokal yang pada prinsipnya telah berkolaborasi dalam memainkan peran negara seperti yang terjadi di negara Philipina (Villanueva, 2015). Sebagai tanggapan atas situasi politik yang tidak menentu selama ini, justru menjadi pemicu timbulnya perlawanan melalui kelompok-kelompok dengan gerakan menentang penyimpangan makna reformasi demokrasi (Sloman, 2020 & Kriesi, 2020)

Dengan demikian paradigma dalam menyerap probelamatiaka di atas adalah tentunya harus berangkat dari ajaran kedaulatan rakyat dimana dalam konteks ini pemerintahan dari, dan untuk rakyat yang selanjutnya melahirkan teori negara. Dogma demokrasi menyakini bahwa suatu sistem dan penentu dalam suatu pemerintahan yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat atau dengan kata lain seagi konsep perwakilan pemerintahan/ *representative government* dan perwakilan demokrasi/ *democratic repretatif* (E. Efriza, 2018 & N. Efriza, 2019). Hegemoni sistem dan model perwakilan, pemilihan umum dan voting di Indonesia sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan demokrasi mengasumsikan bahwa kekuasaan pemerintahan dan terentuknya pemerintah adalah berdasarkan perjanjian masyarakat dengan kontrak sosialnya. Sehingga alternatif dalam memposisikan diri dalam memandang proses demokrasi secara independen adalah dengan mengetahui orientasi relasi dari tiga sitem dan model itu.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan analisis review yaitu pengumpulan data menggunakan data base scopus dan science and tekchnology index kemudian diklasifikasi melalui tabel taxonomi literature review (Snyder, 2019 & Cogliandro et al., 2020). Selanjutnya dilakukan perbandingan dan analisis mendalam untuk mengetahui sistem dan model demokrasi di berbagai negara, baik dari sudut pandang penggunaan sistem, kebijakan, penerapan maupun evaluasi terhadap perkembangan dinamika politik global

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perwakilan

Pada prinsipnya perwakilan mendeskripsikan eksistensi para politisi sebagai pelayan rakyat dan memberi mereka tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan diri mereka yang telah memilihnya Konsep perwakilan adalah, secara luas, sebuah hubungan melalui dimana seseorang atau sebuah kelompok membela, atau bertindak untuk kepentingan sekumpulan masyarakat yang lebih luas. Selain itu dalam sistem politik sebagai jaminal representatif pemerintahan maka perwakilan memiliki model ganda, yaitu Perwakilan, Delegasi, Mandat dan Kemiripan. (Hayward, 2015) mengemukakan bahwa esensi perwalian

adalah melayani kepentingan para konstituen dengan mengarahkan pertimbangan yang matang dan pengetahuan yang luas. Perwakilan juga dianggap sebagai tugas moral karenanya dalam melakukan tindakan tentunya harus di landasi dengan rasionalitas dan kebijaksanaan, sehingga perwakilan adalah mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan dalam rangka memahami problem politik dan ekonomi yang demikian rumit. Kemudian bicara tentang delegasi (Gandara, 2020) menjelaskan bahwa model delegasi dimaknai sebagai seorang yang menyalurkan pandangan-pandangan dari orang lain yang pada prinsipnya memiliki keterikatan dalam pertimbangan dan pilihan sendiri, dengan kata lain bahwa delegasi tidak mengikuti pertimbangannya sendiri. Kelebihan mendasar dari model delegasi adalah adanya ruang terbuka yang lebih luas untuk mengakomodasi kedaulatan rakyat, hal ini disarkan atas *check and balance* antara masyarakat dengan wakil yang di delegasikan. Disamping itu terdapat kelemahan- kelemahan perwakilan melalui model delegasi misalnya dengan keterikatan yang sangat kuat terhadap konstituen cenderung menghasilkan penyempitan gerakan dan rawan konflik (Cutts et al., 2020)

Sementara Mandat dalam negara yang secara aktif mempraktikkan demokrasi, dengan sistem multipartai tentunya selalu berbarengan dengan sistem atau model mandat, hal ini di dasarkan pada pemaknaan bahwa mandat adalah sebuah instruksi atau perintah dari badan yang lebih tinggi untuk tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan, misalnya dalam konsesus perwakilan yang memperoleh mandat dari partai politik untuk mencapai otoritas di diparلمان maka sudah barang tentu wakil tersebut memiliki kewajiban tersendiri selain otoritas kedaulatan rakyat juga sebagai bentuk balas budi terhadap partai yang memberikan mandat. ((Wood, 2015; Harvey, 2020 & Miller, 2019; & Gandara, 2020). Perwakilan pun sangat identik dengan istilah kemiripan. model ini dapat dimaknai pula sebagai perwakilan deskriptif memandang perwakilan pemerintahan sebagai miniatur dari sebuah badan yang lebih besar, namun memiliki kesamaan ciri dan proporsi. Model kemiripan ini lebih mengemukakan bahwa hanya orang-orang yang berasal dari sebuah kelompok tertentu dan yang memiliki pengalaman yang sama dengan kelompok tersebut yang sepenuhnya dapat mengidentifikasi kepentingan-kepentingan dari kelompok tersebut. (Manan et al., 2021)

Penyelenggaraan demokrasi modern memiliki mekanisme perwakilan semakin diterapkan dengan *pertama* sebagian besar masyarakat berjumlah terlalu besar dan terlalu kompleks untuk diterapkannya bentuk-bentuk demokrasi langsung, *kedua* dalam kehidupan sehari-hari tidak semua warga negara mempunyai waktu atau bahkan kecenderungan untuk terlibat dalam politik, *ketiga* karena banyak tuntutan/ perspektif/ kepentingan yang plural serta bertentangan, dibutuhkan wakil yang menyaring tuntutan ini untuk mengkontestasikan dan menegosiasikannya pada forum yang memutuskan kebijakan publik, *keempat* legislasi dan administrasi modern yang bersifat khusus tidak memungkinkan partisipasi warga biasa dalam proses pembuatan undang-undang.

Di dalam demokrasi perwakilan, perwakilan politik mempunyai empat fungsi: *pertama* adalah menyediakan mekanisme untuk perekrutan politisi yang bebas dari nepotisme yang secara umum terjadi pada rezim diktator. Hal ini tidak sulit bagi calon politisi untuk memperoleh posisi dan berkompetisi jika mampu memperoleh cukup dukungan dari pemilih. *kedua* adalah memberikan serangkaian kesempatan bagi publik untuk menilai, mengkritik kinerja pemerintah dan memperdebatkan pilihan kebijakan. Pemilu juga memberikan kesempatan bagi warga negara berpartisipasi secara sukarela dalam proses politik. *ketiga* adalah menyediakan respon dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketika kita berbicara tentang tanggung jawab dalam pemerintahan salah satu fitur yang kita harapkan adalah mereka yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan harus responsif terhadap harapan dan kepentingan masyarakat umum. *Keempat*, fungsi

keterwakilan politik adalah untuk memastikan bahwa para wakil harus bertanggung jawab kepada pemilih atas tindakan mereka dalam pemilu. Untuk saat ini sistem perwakilan dinilai sebagai sistem terbaik daripada model demokrasi langsung ditengah kompleksitas dan masyarakat yang dinamis (Kabiru et al., 2015; Sloman, 2020 & Kriesi, 2020)

Sistem perwakilan juga dilihat sebagai bentuk demokrasi yang lebih unggul karena dapat mendorong wacana publik dan mendidikan warga negara tentang isu-isu kebijakan publik. Sebagaimana perubahan dan pergeseran pendapatmasyarakat, tindakan wakil rakyat dapat mencerminkan perubahan tersebut dan dengan demikianjuga meningkatkan kapasitas responsif sistem politik (Szulecki, 2018). Respon inilah salah satunya adalah hakikat politik yang demokratis. Dengan demikian, keterwakilan, menyediakan sarana yang mungkin lebih efektif untuk mencapai kontrol atas keputusan politik daripada metode demokrasi langsung.

Boudreau et al., (2015) Perwakilan Politik seringkali dalam ilmu politik di perdebatkan. Perdebatan itu terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh para wakil ketika berhadapan dengan yang diwakili, apakah dia akan bertindak sebagai "*delegates*" atau sebagai "*trustess*". Diantara dua pandangan itu, terdapat pandangan ketiga, yakni ketika para wakil bertindak sebagai "*politico*". Disisi lain, mereka juga memiliki kemampuan secara lebih independen dari keinginan-keinginan para terwakil (*the autonomy of representative*).

Luavikar Alfian Cahasta, (2017) menawarkan dua pendekatan berbeda untuk melihat perwakilan. *Pertama* focus pada mata rantai kedaulatan rakyat melalui berbagai macam lembaga perwakilan perantara seperti organisasi demokratis yang mengekspresikan ide dan kepentingan kolektif. *Kedua* adalah pendekatan partisipasi langsung yang tidak hanya melalui mekanisme formal. Pendekatan ini menekankan pada kesepakatan informal, gerakan rakyat dan kelompok loby seperti aksi kewargaan. Di Indonesia sendiri studi tentang keterwakilan menurut (Mubiina, 2020) pada era Orde Baru ada lima pokok masalah dalam perwakilan politik yaitu konsepsi ideologi, kekuasaan, pemilihan umum dan lembaga perwakilan. Keterwakilan antara wakil dengan terwakil dalam sistem perwakilan politik ditunjukan melalui hubungan antara pemilihan umum, budaya politik dan kekuasaan. Pemilihan umum sebagai tata cara untuk memperoleh kedudukan sebagai wakil rakyat untuk anggota badan perwakilan. Dalam aspek kekuasaan akan dilihat bagaimana struktur kekuasaan pasca pemilihan umum, apakah keseimbangan kekuatan antar peserta pemilihan umum.

Pemilihan

Pemikiran terkait dengan pemilihan sesungguhnya telah dipopulerkan oleh Joseph Scumpe di dalam tulisan *Capitalism, Socialism and Democracy*, yang menggambarkan bahwa demokrasi sebagai sebuah tatanan institusional sebagai cara atau mekanisme untuk mengisi jabatan publik melalui kompetisi untuk memperoleh dukungan rakyat. Hal ini nampak pada perkembangan sistem demokrasi modern seperti yang di populerkan di Indonesia dan meskipun banyak teoritikus demokrasi yang secara sadar dan berkeinginan besar untuk mereduksi model demokrasi, tetapi pada kenyataannya sampai saat ini belum satupun yang mampu menemukan format yang lebih tepat untuk memaknai sistem pemilihan dalam demokrasi yang tidak sekedar bernuansa kompetitif sehingga mengabaikan hak dan kewajibannya kepada rakyatnya (Smith, 2018 & Triono, 2017)

Dilain pihak utamanya para politisi atau mereka yang lahir dari sistem pemilihan tersebut menganggap bahwa di dalam demokrasi, metode pemilihanlah yang paling rasional untuk mengakomodasi kepentingan dan kedaulatan rakyat, tetapi dalam perkembangannya kurang mampu membendung beragam proplem dan dinamika sosial politik, sekaligus berimplikasi munculnya ketidakpercayaan (*distrust*) dan disharmonisasi masyarakat terhadap produk kebijakan negara yang lahir dari kompromi politik. Meskipun

asumsi-asumsi demikian berkembang, namun bukan itu satu-satunya alasan untuk memaknai pemilihan dalam demokrasi secara sepihak dan lintas jabatan atau pos apa saja yang termasuk dalam prinsip pemilihan? Jawabannya tentu tidak abstrak bahwa pemilihan dalam sistem demokrasi berorientasi pada jabatan publik terutama legislatif dan eksekutif dengan otoritas dan tanggung jawab yang lebih besar terkait penyusunan kebijakan maupun dalam mengelola negara dan stabilitas pemerintahan (Warren, 2017; Freitag & Ackermann, 2016 & Kiess, 2021)

Pemilihan umum yang membedakan negara demokrasi dengan negara yang bersifat otokrasi, pemilihan umum dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi secara langsung. Sejarah mencatat bahwa pemilihan ada sejak zaman dahulu sebagai salah satu cara masyarakat memilih pemimpinnya (Febriyanti & Pratama, 2017). Kalau dibandingkan dengan sistem pemilihan di beberapa negara dari segi otoritas ada perbedaan mencolok misalnya di Indonesia sendiri pejabat publik memiliki otoritas ganda selain memiliki peranan penting terhadap negara, juga tidak mampu mengabaikan mandatnya dari partai politik. Kenyataan ini memiliki perbedaan misalnya dengan di Inggris dan Kanada meskipun memiliki peran ganda sebagai Kepala Negara dan Konstitusional tetapi mengecualikan otoritas politik sehingga dalam perspektif sederhana diyakini memberikan perhatian penuh terhadap kedaulatan rakyat dan stabilitas pemerintahan (Blanco, 2019)

Pemilihan konvensional diyakini menjadi alat untuk memperhitungkan dan dipaksa untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan opini publik dalam artian bahwa mekanisme pemilihan memiliki fungsi *bottom-up* baik dalam proses rekrutmen politik, perwakilan, pembentukan pemerintahan maupun pengaruh terhadap kebijakan, dilain hal (Boudreau et al., 2015 & Mubiina, 2020) dengan radikal memandang bahwa pemilihan-pemilihan sebagai sarana dimana pemerintah dan elit politik dengan leluasa mengontrol dan melunakkan rakyat, dengan demikian jelas bahwa ini menekankan pada fungsi *top-down* karena otoritas elit politik benar-benar diperkuat. Walaupun realitasnya demikian akan tetapi tetap pada pemahaman bahwa jalur yang diperanakan tentu saja memiliki relasi untuk saling mempengaruhi baik antara pemerintah dengan rakyat terlebih lagi bagi elit politik dengan masyarakat sebagaimana pada urgensi fungsi dari pemilihan-pemilihan yaitu terpenuhinya sistem rekrutmen politisi, pembentukan pemerintahan, penyediaan perwakilan, pengaruh kebijakan, sarana dalam mendidik konstituen, membangun legitimasi serta orientasi dalam memperkuat elit (Kawamura, 2015).

Meskipun diberbagai negara ada yang mempraktekkan sistem pemilihan yang sama dan ada pula yang berbeda antar negara, namun tetap saja pada ikhtiar bahwa mereka tidak memiliki daya untuk terhidar dari sudut pandang perdebatan dan kontroversi baik dalam penyelenggaraan maupun dalam evaluasi terhadap penerapan sistem pemilihan, hal ini di akibatkan karena adanya berbagai macam sistem pemilihan dengan pola dan penerapan yang berbeda. Sistem-sistem pemilihan tersebut antara lain: Sistem Pluralitas Anggota Tunggal (PAT), Sistem Surat Suara Kedua, Sistem Surat Suara Alternatif (SA), Sistem Suara Suplementer (SS), Sistem Proporsional Anggota Campuran (PAC), Sistem Anggota Tambahan (SAT), Sistem Voting Transferable Tunggal (VTT) dan Sistem Daftar Partai. (Bawn et al., 2012; Hou, 2020 & Kubaraciş, 2020).

Pertanyaannya kemudian apakah keseluruhan sistem pemilihan tersebut, masing-masing memiliki transformasi yang efektif dalam menciptakan stabilitas pemerintahan yang maksimal?. Inilah yang kemudian dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa semua sistem pemilihan yang telah di terapkan di berbagai negara memiliki keunggulan dan kelemahan sehingga menimbulkan berbagai perdebatan dan kontroversi di berbagai kalangan, karena tipe dan ciri yang berbeda begitupun kelebihan dan kekurangannya (Mehta, 2013). (Hayward, 2015) ada beberapa asumsi dalam pengertian barat tentang

demokrasi yang dieksplorasi Emerson. *Pertama* adalah konseptualisasi peran pemilihan. Orang-orang mengklaim bahwa ada dua kelemahan utama dalam sistem pemilihan mayoritarian: pertama, anggapan bahwa pendapat mayoritas dapat diperoleh dari suara mayoritas; kedua, penggunaan suara takhayul oleh mereka yang berkuasa untuk memanipulasi sisanya, yaitu kepada para penentang/ minoritas. *Kedua, vis a vis* pemerintahan, adalah asumsi bahwa demokrasi barat menjunjung tinggi, ketidaktahuan, hak mayoritas untuk mengesampingkan minoritas. Tanpa hal-hal seperti itu. *Ketiga*, mungkin yang paling memberatkan, konsekuensi demokrasi barat adalah pencapaian pemikiran demokratis yang bersifat asing ini ke bagian-bagian lain dunia; penyebaran kolonial dari 'peradaban' tidak hanya menggulingkan bentuk-bentuk pengambilan keputusan lain tetapi, mengklaim, sebenarnya menimbulkan konflik.

Voting

Fenomena yang sangat krusial selain dari Perwakilan dan Pemilihan dalam sistem Demokrasi juga dikenal dengan istilah voting dan ini sangat menarik terutama dalam konstruk ideologi dan perilaku sosial (Gersbach, 2019; Gersbach, 2017 & Bol et al., 2018). Wajar saja ketika dalam perkembangan voting lebih menekankan pada pendekatan behaviorial karena pada prinsipnya berkaitan erat dengan perilaku pemilih dalam voting sendiri dikenal (*Voting Behavior*) artinya ada kebebasan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya. Berkaitan perspektif itu (Ardipandanto, 2019) kemudian memaknai bahwa voting behavior merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, terutama dalam memilih pemimpin negara baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*).

Dinamika pemilihan dan perwakilan yang diterapkan di Dunia, pertanyaannya apakah Voting dengan pendekatan behavior menjadi alternatif yang sangat solutif untuk memberi jawaban rasional dari semua itu?. Justru penulis menganggap dalam dunia demokrasi model dan metode apapun tidak ada yang sempurna karena tidak bahkan voting pun tidak sepenuhnya mampu memberi jaminan atas penyelenggaraan pemilihan dan keterwakilan yang lebih adil dan rasional secara kompetitif. Kenapa demikian karena, ekspektasi konstituen secara personal memiliki perbedaan baik dari segi sosiologi maupun aspek psikologi, karena teori-teori yang berusaha di kembangkan oleh (Hayward, 2015) tentang voting memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, misalnya teori-teori yang dikembangkan antara lain:

1. Model Identifikasi Partai

Hakikanya mengindikasikan ikatan psikologi antara konstituen atau dengan kata lain masyarakat dengan partai, hal positif atas penerapan model ini adalah terciptanya *strong fother* atau para partisipan yang memiliki loyalitas tinggi baik kepada partai maupun kepada figur yang dimandatkan oleh partai.

Di Indonesia misalnya secara faktual sejumlah partai-partai besar dan bertahan ditengah persaingan partai lainnya serta mampu mempertahankan kekuasaan pemerintahan, seut saja misalnya misalnya PDIP dengan figurnya Megawati Soekarno Putri, Partai Demokrat dengan sosok SBY dan Partai Golkar yang dengan mayoritas figurnya, bahkan tidak memiliki ancaman yang cukup berarti meskipun bermunculan partai-partai baru, namun popularitas partai dan figurnya tidak berkurang karena adanya komitmen kuat atas ikatan psikologi dari masyarakat dengan paryai tersebut. Dengan demikian solid dan loyalnya partisipan maka akan sangat berimplikasi terhadap jaminan suara dalam sistem voting.

2 Model Sosiologis

Teori voting lebih kepada pendekatan sosial, jadi ini tentunya sangat berkolaborasi dengan nilai-nilai kebangsaan dan pluralitas masyarakat pada suatu sisi sistem demokrasi dengan mekanisme voting jelas berangkat dari sosialisasi, karena bagaimanapun popularitas elit dan partai tanpa melakukan sosial dan pendekatan sosial kepada masyarakat tentu akan sangat kesulitan menemukan irama dalam mengartikulasi arah kebijakan pemerintahan nantinya. Sehingga dengan tersedianya sarana sosialisasi maka secara objektif mempermudah masyarakat untuk menentukan pilihannya pada saat penyelenggaraan voting. Problemnnya kemudian adalah pendekatan ini berpotensi besar menimbulkan perpecahan antar tingkatan kelas masyarakat.

3. Model Pilihan Rasional

Model ini berasumsi bahwa voting tidak lebih hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan tertentu secara individualistik, walaupun dianggap bahwa voting sebagai umpan balik pada partai yang berkuasa sekaligus mengetahui bagaimana kinerja dan penerapan kebijakan dalam mempengaruhi pilihan masyarakat.

Distorsi voting dengan model pilihan rasional adalah nilai sosial dan budaya seakan kabur bahkan memiliki keterbatasan untuk mengevaluasi isu-isu dan mengalkulasi kepentingan, karena terpusat pada loyalitas kelompok dan ikatan partai.

4. Model Idiologi Dominan

Pendekatan ini menyerupai model sosiologis, dimana voting dianggap merefleksikan posisi seseorang dalam hierarki sosial. Bila dibandingkan keseluruhan model yang ada maka dapat dipastikan bahwa model ideologi dominan ini nampak lebih radikal karena oriantasinya melalui jalur pendidikan dan media massa.

Sehingga pengaruhnya terhadap masyarakat akan sangat mendominasi ideologi mereka, bahkan tidak menutup kemungkinan muncul pro dan kontra terhadap mekanisme penerapan voting yang ada, disamping itu dengan konstruk ideologi melalui sosialisasi jalur pendidikan dan media massa justru juga menambah khsanah bagi pemerintah atau elit politik yang lahir dari mekanisme voting untuk mengakselerasi kebijakan atas otoritasnya, yang menjadi kekhawatiran adalah dengan kondisi sosial yang berlebihan maka akan berimbas pada otoritas dan otonomi personal.

Dewasa ini banyak negara menggunakan inovasi teknologi informasi dalam urusan kenegaraan seperti *e-voting*, yang artinya adalah pemilihan itu sendiri dilakukan oleh negara melalui sistem yang berintegrasi. Menurut Rokhman dalam (Ridwan et al., 2016) mengatakan bahwa *e-voting* adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan dan diproses dalam bentuk digital sistem. Dengan kata lainnya *e-voting* merupakan pemungutan suara yang proses pelaksanaannya sendiri mulai dari pendaftaran pemilih sendiri, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara dilaksanakan secara elektronik.

Kajian berbagai model *e-voting* yang pernah diterapkan, termasuk mesin yang diproduksi oleh BPPT. Kesimpulan yang dihasilkan, bahwa *e-voting* bukan teknologi yang dibutuhkan untuk mengganti metode pungut hitung di pemilu Indonesia untuk saat ini. Berdasarkan kajian tersebut, KPU menilai ada tiga syarat yang sejatinya belum benar-benar terjawab melalui *e-voting* yaitu aspek kepercayaan keamanan, aspek transparansi, serta proses uji coba teknis yang terus menerus. Selain syarat tersebut, kunci lainnya adalah kepercayaan masyarakat. penggunaan sistem tersebut akan mengubah paradigma masyarakat soal tata cara memilih pemimpin. Penggunaan *e-voting* masih menghadapi soal kepercayaan masyarakat. Metode ini akan mengubah paradigma masyarakat soal tata cara memilih pemimpin. Selain itu pengalaman negara lain juga menggaris bawahi bahwa persoalan yang di hadapi juga menyangkut kepercayaan.

Kajian berbagai model *e-voting* yang pernah diterapkan, termasuk mesin yang diproduksi oleh BPPT. Kesimpulan yang dihasilkan, bahwa *e-voting* bukan teknologi yang

dibutuhkan untuk mengganti metode pungut hitung di pemilu Indonesia untuk saat ini. Berdasarkan kajian tersebut, KPU menilai ada tiga syarat yang sejatinya belum benar-benar terjawab melalui *e-voting* yaitu aspek kepercayaan keamanan, aspek transparansi, serta proses uji coba teknis yang terus menerus. Selain syarat tersebut, kunci lainnya adalah kepercayaan masyarakat. penggunaan sistem tersebut akan mengubah paradigma masyarakat soal tata cara memilih pemimpin. Penggunaan *e-voting* masih menghadapi soal kepercayaan masyarakat. Metode ini akan mengubah paradigma masyarakat soal tata cara memilih pemimpin. Selain itu pengalaman negara lain juga menggaris bawahi bahwa persoalan yang di hadapi juga menyangkut kepercayaan.

KPU telah menerapkan teknologi *e-recapitulation* (*e-recap*) yang disebut SITUNG (Sistem Informasi Pungut Hitung) itu pada pemilu 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017. Meski tidak punya sifat mengkoreksi atau menyatakan hasil perolehan suara, sistem ini diklaim tingkat kesuksesannya tinggi dan minim celah gugatan.

(Wallach, 2008) menyebutkan bahwa memang di beberapa Negara penggunaan *e-voting* sudah berjalan dengan baik, tetapi di Indonesia sendiri masih belum di terapkan karena Perludem mendesak Pemerintah serta DPR RI untuk tidak menjadikan *e-voting* sebagai satu-satunya solusi teknologi untuk pungut hitung Indonesia. Pemerintah dan DPR sebaiknya ikut mempelajari dan mempertimbangkan teknologi *e-recap* yang sedang disiapkan oleh KPU RI. Minimnya pilihan teknologi serta ketergesaan dalam mengambil keputusan dapat meruntuhkan pencapaian baik yang telah diraih oleh Indonesia di bidang pemilihan. Dalam hal ini kami melihat ada tiga faktor yang menyebabkan belum siapnya pemerintah kita dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk melaksanakan sistem *e-voting* di Indonesia. Walaupun kajian-kajian tentang penerapan sistem *e-voting* ini sudah lama dilakukan sejak dari KPU periode 2004, bahkan DPR telah beberapakali melaksanakan study banding di beberapa negara yang sudah melaksanakan sistem *e-voting*.

Dari seluruh seluruh kajian yang pernah dilakukan baik oleh pemerintah maupun LSM kami melihat ada tiga faktor utama yang harus disiapkan pemerintah terlebih dahulu untuk dapat melaksanakan sistem *e-voting*. Karena faktor ini kami anggap menentukan dapat terlaksananya sistem *e-voting* tersebut di Indonesia.

1. Analisis Kelayakan Sumber Daya Manusia

Di Indonesia, penerapan *e-Voting* sendiri menimbulkan beberapa kekhawatiran mengenai kendala apa saja yang bakal dihadapi jika benar-benar menggunakan sistem *e-Voting* ini. Salah satunya yakni kesiapan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Indonesia untuk menggunakan sistem ini. Kenyataan bahwa SDM Indonesia yang masih timpang terutama kelompok usia tua di pedesaan yang ketinggalan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Windiasih, 2019). Sehingga diperlukan penelitian lebih dalam mengenai kesiapan SDM Indonesia dalam penggunaan sistem *e-Voting*. sistem *e-Voting* dapat diterapkan dengan asumsi bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan dasar tentang penggunaan komputer dan internet serta *e-KTP* sebagai alat validasi yang akurat karena nomor KTP mempunyai nilai yang unik atau berbeda satu dengan yang lain.

2. Analisis Kelayakan Ekonomi

Besarnya anggaran yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pilkada terkadang tidak diimbangi dengan hasil pilkada yang berkualitas. Sebelum pilkada, penyelenggara disibukkan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih menggunakan sistem manual.

Yang terjadi kekacauan berkaitan dengan DPT di berbagai daerah terus terjadi. Banyak masyarakat yang kehilangan hak suaranya karena tidak terdaftar dalam DPT. Belum lagi

berbagai masalah yang timbul lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemilu mulai dari surat suara dan kotak suara yang rusak. Hingga puncaknya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pilkada, yang mengakibatkan kerusuhan dan pengrusakan terhadap infrastruktur milik pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian pasca pilkada. Hal ini akan menambah besar anggaran biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi konflik pasca pilkada (Akbar, 2006; Dua, 2017; Kamuri, 2019; Ma'ruf, 2019; Nurullah, 2016).

Berkaitan dengan *e-Voting*, dalam penerapannya dilihat dari sisi ekonomi pemerintah selaku penyelenggara yang akan membuat sistem tersebut pengeluaran anggaran untuk membangun pertama sekali sistem *e-voting* pasti cukup besar karena harus membangun jaringan dan sistem diseluruh wilayah indonesia kemudahan juga perlu dilakukan sosialisasi yang masif untuk penerapan sistem ini. Selain itu biaya untuk perawatan sistem ini juga perlu untuk diperhitungkan karena setiap tahun pasti harus di *upgrade*.

3. Analisis kepercayaan masyarakat

Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum familiar dengan teknologi informasi menjadi salah satu kendala tersendiri, dan pengetahuan masyarakat mengenai sistem teknologi tersebut juga masih rendah. Kemudian masih munculnya

paradigma ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil perhitungan suara karena hasil kucurigaan data dimanipulasi oleh pihak tertentu dapat menyebabkan kekacauan dan konflik dalam masyarakat (Redy Hendra Gunawan, 2020; Rohmat et al., 2018; Surbakti, 2016; Wijaya & Permatasari, 2019; Yunus, 2018).

Sehingga penerapan sistem *e-voting* ini sangat kurang kepercayaan masyarakat karena mereka melihat sistem ini masih merupakan hal baru jadi kecurigaan dan kewaspadaan masyarakat sangat tinggi terutama masalah kecurangan, tapi hal ini terjadi biasanya pada masyarakat tingkat bawah atau masyarakat awam.

Adopsi dan penerapan kebijakan demokrasi di berbagai negara sangat dinamis. Delegasi kewenangan atas kuasa pemerintahan mendominasi dinamika dan perkembangan demokrasi dan politik itu sendiri. Dampaknya adalah negara maju di Eropa selalu menjadi kiblat oleh negara berkembang dan rangka memainkan peran politik negara. Namun dari aspek kebijakan, beberapa negara di Asia kian memiliki cenderung mencari bentuk yang ideal. Realitas ini muncul diskursus artinya disisi lain model-model demokrasi dan politik yang mereka jalankan terlihat tidak mampu mengabaikan kepentingan elit. Sehingga sistem perwakilan, mandat mapan voting hanya mendai model dan sistem terbelenggu dalam bayang-banyak kepentingan sekelompok elit (Alian, 2019; Fokatea & Mas'udi, 2020; Hasbullah & Rahman, 2018; Ramdhani, 2019; Rozak et al., 2020). Implikasinya adalah modal ekonomi yang diharapkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan distrust. Alih-alih menciptakan kualitas demokrasi, namun yang muncul adalah apatisme dan diskursus kebijakan politik maka tidak heran kemudian, bila muncul ruang-ruang politik yang praktiknya cenderung koruptif

KESIMPULAN

Perwakilan adalah sebuah hubungan dimana warga negara bertindak untuk kepentingan umum dan hal ini di capai melalui mekanisme demokrasi yang mendelegasikan para elit politik mewakili rakyat dalam merespon aspirasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rakyat. Mekanisme perwakilan tentunya tidak bisa dipisahkan dari proses pemilihan sebagai *tools* dalam merepresntasikan diri dalam kompetisi demokrasi, mengakselerasi kebebasan memilih dan keadilan politik secara universal. Sehingga di suatu sisi menjalankan fungsi *bottom up* dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk proses perumusan dan pengimplementasian kebijakan dan disi lain memperkuat elitisme dalam membangun legitimasi publik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perwakilan dan pemilihan erat kaitannya dengan faktor yang membentuk perilaku voting, dimana voting merupakan *tools* dalam menyoroti peran dan pengaruh dari identifikasi partai dan relasi

sosialnya melalui pilihan rasional setiap individu sebagai bentuk ideologis dalam menakar keterwakilan dari hasil pemilihan dan voting tersebut.

REFERENSI

- Akbar, H. (2006). Argentina: Antara Pemerintahan Militer, Krisis Ekonomi Dan Demokrasi. *Jurnal Masalah Sosial Politik Dan Kebijakan*.
- Al-Hamdi, R. (2015). Coping with religious tolerance and gender equality: comparing Islam and good governance perspectives. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. <https://doi.org/10.18326/ijims.v5i2.163-193>
- Alian, A. (2019). Elit Politik Lokal Dalam Otonomi Daerah: Peranan Ppp-Kot Dalam Pemekaran Wilayah Oku Timur 2001-2004. *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*. <https://doi.org/10.29300/tjksi.v4i1.1225>
- Ardipandanto, A. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*.
- Bawn, K., Cohen, M., Karol, D., Masket, S., Noel, H., & Zaller, J. (2012). A theory of political parties: Groups, policy demands and nominations in American politics. In *Perspectives on Politics*. <https://doi.org/10.1017/S1537592712001624>
- Blanco, L. (2019). The Impact of Insecurity on Democracy and Trust in Institutions in Mexico. In *The Impact of Insecurity on Democracy and Trust in Institutions in Mexico*. <https://doi.org/10.7249/wr940>
- Bol, D., Blais, A., Gillard, X., Nunez Lopez, L., & Pilet, J. B. (2018). Voting and satisfaction with democracy in flexible-list PR. *Electoral Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.09.007>
- Boudreau, C., Elmendorf, C. S., & MacKenzie, S. A. (2015). Lost in Space? Information Shortcuts, Spatial Voting, and Local Government Representation. *Political Research Quarterly*, 68(4), 843–855. <https://doi.org/10.1177/1065912915609437>
- Cahasta, L. A. (2017). Politik Representasi Rumah Aspirasi : Studi Tentang Rumah Aspirasi Budiman Di Kabupaten Banyumas-Cilacap. *Journal of Governance*. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2679>
- Cogliandro, A., Barone, M., Ciarrocchi, S., Salzillo, R., Moss, T., Tambone, V., & Persichetti, P. (2020). A systematic review on the Derriford Appearance Scale (DAS) questionnaire in surgical research. *European Journal of Plastic Surgery*. <https://doi.org/10.1007/s00238-020-01660-w>
- Cutts, D., Goodwin, M., Heath, O., & Surridge, P. (2020). Brexit, the 2019 General Election and the Realignment of British Politics. *Political Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12815>
- Dua, M. (2017). Globalisasi Ekonomi, Budaya Kapitalis Dan Demokrasi. *Jurnal Ledalero*. <https://doi.org/10.31385/jl.v12i2.97.355-372>
- Efriza, E. (2018). Refleksi Kinerja Politisi DPR Era Reformasi. In *Communitarian*.
- Efriza, N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik. *Jurnal Politica Dinamika*

Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional.

- Febriyanti, D., & Pratama, M. J. (2017). *PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN AMERIKA SERIKAT DENGAN INDONESIA*. 2(1).
- Fokatea, F. A., & Mas'udi, W. (2020). Konsolidasi Elit Dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus di Kabupaten Kepulauan Sula. *Journal of Governance and Social Policy*. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18530>
- Freitag, M., & Ackermann, K. (2016). Direct Democracy and Institutional Trust: Relationships and Differences Across Personality Traits. *Political Psychology*. <https://doi.org/10.1111/pops.12293>
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92–99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3>.
- Gersbach, H. (2017). Co-voting democracy. *Economics of Governance*. <https://doi.org/10.1007/s10101-017-0195-7>
- Gersbach, H. (2019). Daring More Digital Democracy. *Wirtschaftsdienst*. <https://doi.org/10.1007/s10273-019-2495-8>
- Harvey, D. (2020). The City as a Body Politic. In *Wounded Cities*. <https://doi.org/10.4324/9781003087465-2>
- Hasbullah, M., & Rahman, M. T. (2018). Elit Politik Islam Nasional dan Pengembangan Pesantren di Daerah. *Jurnal Socio-Politica*.
- Hayward, K. (2015). Defining Democracy: Voting Procedures in Decision-making, Elections and Governance. *Representation*, 51(2), 269–271. <https://doi.org/10.1080/00344893.2015.1064225>
- Higashikata, T., & Kawamura, K. (2015). *Voting Behavior in Indonesia from 1999 to 2014*. 512.
- Hou, P. (2020). Menu or Mandate? EU Governance and Party Politics in Poland. *Chinese Political Science Review*. <https://doi.org/10.1007/s41111-020-00147-0>
- Kabiru, J. N., Elly, D., Hellen, O., & Kinyua, W. (2015). The Effect Of General Elections On Stock Returns At The Nairobi Securities Exchange. *European Scientific Journal*.
- Kamuri, J. P. (2019). Hasrat Ekonomi Politisi dan Penurunan Kualitas Demokrasi Indonesia Jelang Pemilu 2019. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.33550/sd.v6i1.108>
- Kiess, J. (2021). Learning by doing: The impact of experiencing democracy in education on political trust and participation. *Politics*. <https://doi.org/10.1177/0263395721990287>
- Kriesi, H. (2020). Is There a Crisis of Democracy in Europe? *Politische Vierteljahresschrift*. <https://doi.org/10.1007/s11615-020-00231-9>
- Kumbaracıbaşı, A. C. (2020). Models of party institutionalization and problems of democratic consolidation. *Mediterranean Politics*. <https://doi.org/10.1080/13629395.2018.1537102>
- Ma'ruf, M. (2019). Mengarahkan Demokrasi Pancasila (Relasi Demokrasi, Ekonomi Dan

Politik). *Jurnal Ilmiah CIVIS*.

- Manan, B., Perwira, I., & Susanto, M. (2021). Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Partai Politik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art1>
- Mehta, J. (2013). How Paradigms Create Politics. *American Educational Research Journal*. <https://doi.org/10.3102/0002831212471417>
- Miller, D. (2019). The populist fantasy: American ethno-nationalism and the dysphoria of the body politic. In *Soundings*. <https://doi.org/10.5325/soundings.102.2-3.0226>
- Mubiina, F. A. (2020). Pola Hubungan Fraksi Dengan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.80>
- Nurullah. (2016). Sistem Ekonomi dan Demokrasi. *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi*.
- Ramdhani, H. (2019). Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3014>
- Redy Hendra Gunawan. (2020). Saluran Komunikasi Politik dalam Pembangunan Demokrasi pada Pemilu Legislatif DPR-RI di Kota Bogor 2019. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. <https://doi.org/10.46937/18202031350>
- Ridwan, M., Arifin, Z., Studi Ilmu Komputer, P., Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, F., Mulawarman Jalan Barong Tongkok Kampus Gunung Kelua Samarinda, U., & Timur, K. (2016). Rancang Bangun E-Voting Dengan Menggunakan Keamanan Algoritma Rivest Shamir Adleman (Rsa) Berbasis Web (Studi Kasus : Pemilihan Ketua Bem Fmipa). *Jurnal Informatika Mulawarman*, 11(2), 22-28.
- Rohmat, R., Syarifuddin, I., & Holish, A. M. (2018). Pengaruh Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Generasi Muda Terhadap Tingkat Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*.
- Rozak, A., Kartini, D. S., & Djuyandi, Y. (2020). Strategi Survivalitas Warga dan Politik Survivalitas Aktor Politik pada Konflik Pertambangan. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.53-75>
- Sloman, P. (2020). Squeezed Out? The Liberal Democrats and the 2019 General Election. *Political Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12816>
- Smith, S. (2018). Democracy and the body politic from Aristotle to Hobbes. *Political Theory*. <https://doi.org/10.1177/0090591716649984>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Stein, R. M., Vonnahme, G., Byrne, M., & Wallach, D. (2008). Voting Technology, Election Administration, and Voter Performance. *Election Law Journal*, 7(2), 123-135. <https://doi.org/10.1089/elj.2008.7203>
- Supardal, S. (2016). Penerapan ICT dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 120. <https://doi.org/10.26618/ojip.v6i2.272>

- Surbakti, R. (2016). Perekayasaan sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis. *Kemitraan Partnership*.
- Szulecki, K. (2018). Conceptualizing energy democracy. *Environmental Politics*. <https://doi.org/10.1080/09644016.2017.1387294>
- TRIONO, T. (2017). MENAKAR EFEKTIVITAS PEMILU SERENTAK 2019. *Jurnal Wacana Politik*. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205>
- Volodin, D. (2019). Deliberative democracy and trust in political institutions at the local level: evidence from participatory budgeting experiment in Ukraine. *Contemporary Politics*. <https://doi.org/10.1080/13569775.2018.1544683>
- Warren, M. E. (2017). Trust and democracy. In *The Oxford Handbook of Social and Political Trust*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190274801.013.5>
- Wijaya, J. H., & Permatasari, I. A. (2019). Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia. *CAKRAWALA*. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v12i2.274>
- Windiasih, R. (2019). Komunikasi Pembangunan di Era Digital melalui e-Government dalam Pelayanan Publik dan Pemberdayaan. *Suluh Pembangunan : Journal of Extension and Development*. <https://doi.org/10.23960/jsp.v1i1.6>
- Wood, W. (2015). Politic. In *TLS - The Times Literary Supplement*. <https://doi.org/10.5040/9781623562953.03489>
- Yunus, N. R. (2018). Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019. 'ADALAH. <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i8.8844>